



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 848/II/2015

I/FEBRUARI 2015



## DPR TOREHKAN INOVASI BARU PENYUSUNAN RAPBN



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

# DPR TOREHKAN INOVASI BARU PENYUSUNAN RAPBN



Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad bersama Menkeu dan Gubernur BI saat penandatanganan besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN-P 2015

Komisi XI DPR dan Pemerintah, akhirnya menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan Tahun Anggaran 2015. Sebelum besaran asumsi makro itu disepakati, seluruh fraksi di Komisi XI menyampaikan pandangan masing-masing fraksi.

“Tidak mudah mengambil keputusan ini. Karena ada pertimbangan masalah ekonomi dan politik,” kata Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan Badan Pusat Statistik, di Gedung Nusantara I, Senin (26/01/15) malam.

Kesepakatan asumsi makro yang dicapai, meliputi besaran pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,7 persen. Angka itu turun 0,1 persen

dari angka yang diusulkan Pemerintah, yang mengusulkan angka 5,8 persen. Sebelumnya, hampir sebagian besar Fraksi di Komisi XI mengusulkan pertumbuhan ekonomi yang realistis adalah 5,6 persen.

Terkait besaran angka pertumbuhan ekonomi tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan yang bisa dicapai sebenarnya hanya 5,3 persen. Namun, dengan adanya relokasi subsidi ke belanja produktif, maka ada peluang untuk meningkatkan pertumbuhan. Belanja infrastruktur itu diperkirakan akan mampu menambah pertumbuhan 0,5 persen.

“Perkembangan global begitu cepat, sehingga angka 5,7 persen membutuhkan *extra effort* dari belanja APBN, dan untuk mengantisipasi dampak dari stimulus Eropa dan Jepang,” kata Bambang.

Asumsi makro berikutnya, lanjut Fadel, inflasi disepakati sebesar 5,0 persen, Suku Bunga SPN 3 Bulan 6,2 persen dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar sebesar Rp 12.500 per 1 US\$.

Fadel mengemukakan, ada sejumlah inovasi baru dalam kesepakatan tentang penyusunan RAPBN, yaitu disepakatinya Target Pembangunan Nasional. Indikator itu meliputi, asumsi tingkat pengangguran disepakati sebesar 5,6 persen dan 10,3 persen untuk tingkat kemiskinan. Berikutnya, indeks gini rasio sebesar 0,40 dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,40 melalui metode penghitungan yang baru.

“Pembahasan RAPBN-P 2015 ini telah menghasilkan inovasi kebijakan yang berdampak positif bagi rakyat dan menjadikan kinerja pemerintah agar terukur. Dimasukkannya gini rasio dan IPM menjadi instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah, merupakan sesuatu yang menggembirakan. Dua indikator target pembangunan tersebut akan mampu mengawal Nawacita, yang utamanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan,” jelas Politisi asal Dapil Gorontalo ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun. Politisi Golkar ini menyatakan, kesepakatan itu menjadi momen bersejarah bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kesepakatan tersebut merupakan kali pertama dalam sejarah penyusunan RAPBN RI karena memuat target pembangunan dengan mencantumkan sejumlah persoalan yang terkait langsung masyarakat, yaitu tingkat pengangguran, angka kemiski-

nan, gini rasio dan IPM.

“Ini adalah jejak pertama pemerintahan yang baru terpilih dalam menjalankan dan mengoperasikan negara. Hal itu masuk dan dibahas bersama dengan asumsi makro ekonomi untuk dijadikan acuan pencapaian dalam pelaksanaan APBN kita,” ungkap Politisi asal Dapil Jawa Timur II ini.

Masih termasuk dalam kesimpulan rapat, Komisi XI meminta kepada Pemerintah dalam memanfaatkan ruang fiskal yang besar, untuk diarahkan kepada percepatan penurunan

kemiskinan, penurunan gini rasio, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), pengurangan *gap structural* dan regional serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

“Komisi XI juga meminta Pemerintah untuk menambah alokasi sebesar Rp 5,0 triliun dalam APBN-P 2015, bagi kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tambah Fadel membacakan kesimpulan rapat.

Komisi XI sepakat, tambah Politisi

Golkar ini, untuk melakukan pembahasan secara khusus dalam rangka Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam APBN-P 2015.

“Komisi XI juga sepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait Pendapatan Negara dalam APBN-P 2015. Ke depannya, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah dan APBN, Pemerintah harus mengkomodir UU No 16 Tahun 2014 tentang Desa,” tutup Fadel. (sf) foto: naefurodji/parle/hr.

## Ketua Komisi V DPR Pimpin Panja Keamanan, Keselamatan dan Kualitas Penerbangan Nasional

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis (F-Gerindra) pimpin Panja Keamanan, Keselamatan dan Kualitas Penerbangan Nasional. Panja dibentuk pada tanggal 26 Januari 2015, dengan Wakil Ketua Panja Muhidin M. Said (F-PG), Michael Wattimena (F-PD), Yudi Widiana Adia (F-PKS) dan Lasarus (F-PDI Perjuangan). Anggota Panja berjumlah 27 orang dari 10 Fraksi yang berada di Komisi Perhubungan tersebut.

Panja ini ditargetkan bekerja selama tiga bulan semenjak terbentuknya untuk mengumpulkan data-data terkait dari berbagai sumber. Sedangkan untuk tahap selanjutnya, penganalisaan data/informasi dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi diharapkan sampai dengan akhir Tahun 2015. Setelah hasil akhir pelaksanaan tugas Panja dilaporkan dan ditetapkan dalam Rapat Komisi V DPR RI, tugas Panja dinyatakan selesai dan berakhir.

Dalam proses pengumpulan dan analisa data dan informasi ini, Panja akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak, baik itu regulator, operator maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan penerbangan nasional. Ada kurang lebih tiga puluh empat pihak/instansi yang akan diundang dalam RDP atau RDPU. Selain melakukan serangkaian RDP dan RDPU, Panja dapat juga melakukan peninjauan lapangan ke daerah-daerah yang akan ditentukan kemudian, diantaranya Bandar Udara Juanda-Surabaya, Bandar Udara Ngurah Rai-Denpasar, Bandar El Tari-Kupang.

Menurutnya, terdapat beberapa hal penting yang akan menjadi fokus perhatian dalam proses kerja Panja, seperti: Aspek regulasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Bagaimana operasionalisasi peraturan turunan sebagai pelaksana dari amanat UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Peraturan Pemerintah, Kepmen, Peraturan Dirjen). Sejauh mana amanat pembentukan lembaga-lembaga sesuai dengan UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dari pengalaman beberapa kecelakaan, lanjutnya, terdapat 3 (tiga) faktor kategori utama, yaitu *human factor* yang mencakup pelaksanaan prosedur dan/atau standar yang berlaku, pengawasan, baik internal maupun eksternal, dan pelaksanaan ketentuan, dan beban kerja atau jam



Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis saat memimpin rapat

kerja yang berlebih atau kurang istirahat.

Kemudian, Faktor teknis yang mencakup kurang berfungsinya atau tidak efektifnya peralatan-peralatan atau sistem pada pesawat, dan kegagalan atau kesalahan pada proses produksi. Berikutnya, yaitu faktor lingkungan (*environmental*), yang mencakup lingkungan bandara udara, termasuk kurang sterilnya *runway*. Faktor cuaca tidak dipertimbangkan sebagai faktor penyebab utama kecelakaan, namun merupakan faktor yang berkontribusi untuk meningkatkan terjadinya resiko kecelakaan.

“Dalam konteks ini, perlu pendalaman terhadap kelembagaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terkait dengan Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan kelembagaan. Selain itu akan ada pendalaman terkait potensi fluktuasi harga tiket terhadap faktor Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan,” ujar Fary dalam siaran persnya.

Untuk turut memudahkan proses kerja, Panja juga akan memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan dari Audit ICAO USOAP tahun 2014 terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dunia penerbangan Indonesia. Dalam pelaksanaannya ada 8 (delapan) area yang diaudit dalam USOAP, yaitu: Perundang-undangan (*Legislation*), Organisasi, Lisensi (*Licensing*), Operasi (*Operations*), Kelaikudaraan (*Airworthiness*), Badan/Lembaga Investigasi Kecelakaan, Pelayanan Navigasi Udara, dan Bandar Udara (*Aerodromes*). (si) foto: rizka/parle/iw

# DPR Minta Nomenklatur Kemenristekdikti Dikaji Ulang

Komisi X meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang nomenklatur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja antara Komisi X dengan Menristekdikti Muhammad Nasir, beserta jajarannya, di Gedung Nusantara I, Rabu (28/01/2015). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman.

“Nomenklatur harus berubah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Kalau tidak diubah, kita yang kesulitan untuk mengatur anggarannya,” kata Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore, saat ditemui usai raker.

Pasalnya, menurut peraturan perundang-undangan, riset teknologi yang dianggarkan oleh Pemerintah sebagai fungsi pendidikan adalah riset yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

“Kalau risetnya dilakukan oleh in-



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore

stansi lain, bagaimana anggarannya? Sehingga, kalau riset teknologi di bawah pendidikan tinggi, itu merupakan fungsi dari pendidikan. Kita tidak pusing memilah-milah mana dikti, mana riset,” imbuh Politisi Demokrat ini.

Terkait Nomenklatur ini, Menristek mengaku sudah mengajukan kepada Presiden. Sehingga, tambah Jefirstson, segera dapat diubah nomenklaturnya.

Sementara itu, mengenai Beasiswa Bidik Misi, Komisi X mendorong Kemenristekdikti untuk meningkatkan perhatian kepada Perguruan Tinggi Swasta.

“Kita dorong, agar pelajar di daerah dapat merasakan Bidik Misi yang disediakan oleh Pemerintah. dan Pemerintah menyetujui itu. Jangan hanya negeri saja, tapi sampai ke swasta juga,” imbuh Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur II ini.

Selain itu, Komisi X juga meminta Kemenristekdikti untuk melakukan koordinasi dengan Kemendikbud untuk menjadikan hasil Ujian Nasional pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat, sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi.

Dan untuk menghasilkan guru yang berkualitas, Komisi X mendorong Kemenristekdikti untuk meningkatkan mutu dan daya saing Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. (sf/

foto:andri/parle/iw.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak menilai validasi data oleh Kementerian sosial sangat diperlukan dalam pelaksanaan program-program sosial lainnya. Oleh karenanya pihaknya akan

## Komisi VIII Dukung Validasi Data Kemensos

memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

“Semua program Kementerian sosial akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika ada data yang valid. Dalam Undang-undang untuk pendataan memang menjadi tanggung jawab dari BPS (badan pusat statistik), namun Kemensos bertanggung jawab terhadap validasi data tersebut. DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap Kemensos untuk melakukan validasi data, terutama dukungan berupa anggaran,” jelas Deding, di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa, Rabu (28/1).

Deding menjelaskan sejauh ini Mensos mengajukan anggaran sebesar Rp

60 Miliar untuk program validasi data. Atas pengajuan tersebut Deding mengaku akan mengkaji terlebih dahulu bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII lainnya.

“Dikatakan Mensos bahwa tidak mungkin melakukan validasi tanpa anggaran, ini tentu dapat kita maklumi bersama tapi berapa besar anggaran tersebut, tentu akan kami kaji terlebih dahulu pengajuan anggaran dari Mensos tersebut. Namun, kami juga mengharapkan agar Kemensos dapat melakukan koordinasi dengan BPS untuk mendapatkan data yang valid dan akurat,” papar Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

### RALAT

Dalam Buletin Parlemen, Nomor 845/1/2015, Januari 2015, halaman 3, tertulis “..... Duta Besar Ekuador untuk Indonesia Eduardo Alberto Calderon.....”, seharusnya tertulis “..... Duta Besar Ekuador untuk Indonesia Rodrigo Riefrio....”. Dengan demikian, kesalahan telah dikoreksi. *Redaksi Parlemen*

## Eksekusi Mati Perlu Didukung Diplomasi

Komisi III DPR RI menyampaikan dukungan atas kebijakan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung yang telah menunjukkan ketegasan, menjalankan vonis mati bagi enam narapidana narkoba. Namun pelaksanaannya perlu didukung diplomasi, menjelaskan posisi hukum Indonesia kepada negara yang warganya dieksekusi.

“Perlu dilakukan diplomasi, penjelasan yang utuh kepada negara asal terpidana hukuman mati berasal, agar negara tersebut memahami secara lengkap mengenai substansinya dan menerima atas apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia,” kata anggota Komisi III Didik Mukrianto dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/15).

la khawatir apabila diplomasi terkait kebijakan eksekusi ini tidak dilakukan akan terjadi ‘balas dendam’ negara lain terhadap warga negara Indonesia yang saat ini juga sedang mengha-



Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto

dapi pidana mati. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini kemudian menyebut keberhasilan pemerintahan SBY dalam membangun diplomasi ini.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPAN Daeng Muhammad mengkritisi pemberitaan media terutama siaran langsung eksekusi mati yang dinilainya

berlebihan. Menurutnya publik cukup mengetahui dari kejaksan, eksekusi telah dilaksanakan.

“Kita juga harus berempati kepada keluarga korban, ini eksekusi mati masyarakat seperti menyaksikan siaran langsung aksi malaikat Izrail,” tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar VII ini.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III Aziz Syamsudin, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan upaya menjelaskan kebijakan ini kepada negara terkait sudah dilakukan. Ia menyebut Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat narkoba, empat juta anak bangsa saat ini menghadapi kematian karena terjerat narkoba.

“Kita bukan berhadapan dengan negara tapi menghadapi kejahatan serius. Negara kita saat ini menduduki posisi ketiga jaringan narkoba internasional setelah Mexico dan Kolombia. Indonesia darurat narkoba,” demikian Prasetyo. (iky), foto : andri/parle/hr.

## Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Libatkan Pemda Papua Dalam Renegosiasi Kontrak Freeport

Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses renegotiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia tetap berpegang pada kepentingan nasional dengan tetap melibatkan pemerintah daerah Papua.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Perwakilan SKK Migas, BPH Migas serta Pertamina, di Gedung Nusantara I, Rabu dini hari. (28/1).

“Komisi VII DPR RI juga mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta dengan tegas agar PT Freeport Indonesia segera membangun smelter sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan memprioritaskan di Papua,” tegas Satya membacakan kesimpulan hasil Raker tersebut.

Menurut Satya, Komisi VII DPR RI juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meninjau kembali MoU yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba dan PT Freeport Indonesia pada tanggal 25 Januari 2015, agar sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Sementara kesimpulan lainnya yaitu, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menyelesaikan renegotiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) mengingat batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara tanggal 12 Januari 2015 telah terlampaui, dan dilaporkan ke Komisi VII DPR RI

“Komisi VII DPR RI juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mine-



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha

ral RI untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelesaian program FTP (Fast Track Program/percepatan pembangkit listrik) tahap I dan FPT tahap II 10.000 MW, serta menyampaikan grand design

dan *roadmap* rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW hingga 2019, untuk dilaporkan secara berkala kepada Komisi VII DPR RI setiap 6 bulan, sejak kesimpulan rapat kerja pada

hari ini,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi

wilayah kerja migas yang akan habis masa kontraknya, dengan memberikan prioritas kepada perusahaan nasional (BUMN dan BUMD dan swasta nasional). (Si), foto : *naefurodjie/parle/hr.*

## Komisi V DPR Minta Kemenhub Tingkatkan Peran Pengawas Internal

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan peran pengawas internal dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara di Kementerian Perhubungan.

Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena, di Gedung Nusantara, Rabu, (28/1)

Didalam Kesimpulannya, Komisi V DPR RI memberi apresiasi kepada Kementerian Perhubungan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan opini Wajar Tanpa



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena

Pengecualian (WTP). Selanjutnya

Komisi V DPR RI meminta agar Kementerian Perhubungan dapat mempertahankan opini tersebut.

“Komisi V DPR RI mendukung upaya Menteri Perhubungan untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan dalam rangka penyegaran, transparansi dan peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan beberapa temuan dan menyampaikan evaluasi kepada Komisi V DPR RI dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari ini. (Si), foto : *riska arinindya/parle/hr.*

## Baleg Terima Masukan Prolegnas 2015-2019 dari Elemen Masyarakat



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo

Terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, hari ini, Rabu (28/1/2014) Badan Legislasi DPR (Baleg) menerima masukan dan usulan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Komnas Perempuan, LBH APIK, Jala PRT dan KAI (Kongras Advokat Indonesia).

Rancangan Undang-Undang yang diusulkan antara lain RUU Persamaan dan Keadilan untuk Perempuan, RUU Sistem Peradilan Keluarga, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Advokat.

Menurut Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo yang memimpin rapat tersebut, mengucapkan terima kasih atas masukan berbagai RUU yang disampaikan ke Baleg.

Firman menyatakan, bahwa RUU yang diusulkan sudah masuk dalam draft Rancangan Prolegnas 2015-2019.

“Setelah mendengarkan berbagai penjelasan, tentunya nanti kami juga akan melakukan harmonisasi bersama komisi-komisi terkait juga dengan pemerintah dan DPD RI untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas di urutan pembahasan di tahun 2015 sampai 2019,” ujar Firman di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR, Jakarta, belum lama ini.

Pada kesempatan tersebut, Fiman menjelaskan ada Prolegnas jangka pendek yaitu tahunan dan ada Prolegnas jangka panjang yaitu lima tahunan.

Firman mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan masukan terkait prolegnas ini, tidak hanya menyampaikan usulan tersebut di Baleg saja, tapi juga disampaikan ke komisi-komisi terkait, DPD RI.

Hal ini dimaksudkan, agar memiliki sikap yang sama bahwa RUU yang diusulkan menjadi RUU yang sangat penting untuk dilakukan pembahasan.

Firman menegaskan, sukses daripada pembahasan RUU menjadi UU adalah ketika pemerintah juga ikut menyetujui. Pasalnya ada persepsi yang salah di masyarakat, seolah-olah pembahasan UU itu merupakan otoritas penuh DPR.

“Didalam UU kita tidak mengatakan seperti itu. RUU bisa disahkan menjadi



UU ketika pemerintah juga ikut menyetujui. Biasanya disitu ada konflik kepentingan didalamnya,” tegas politisi Partai Golkar ini.

“Ketika konflik kepentingan itu tidak dilakukan loby-loby, maka UU itu menjadi *deadlock* dan ada UU sampai 11 tahun tidak selesai,” tambahnya.

la berharap, RUU yang disampaikan ini bisa diselesaikan pada masa sidang yang akan datang. Khususnya UU tentang Advokat, karena DPR tidak mengenal *Carry Over Legilacy*, maka harus kembali lagi dalam Prolegnas yang akan disusun.

“Ini (RUU Advokat) perjuangan

masih panjang, sedangkan periode kemarin pembahasan tinggal 1 Pasal, tapi semuanya *overhaul*. Jadi jika ini tidak selesai jangan salahkan kami, pemerintah juga harus memiliki sikap yang sama,” tandas Firman. (sc) foto: andri/parle/hr



Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati

Implementasi Kurikulum 2013, tetap menjadi sorotan publik, tak terkecuali Komisi X DPR. Komisi X menilai penghentian sementara penerapan K13 membuat pihak penyelenggara pendidikan menjadi bingung. Pemerintah dinilai tidak memiliki ketegasan untuk menentukan, apakah K13 dapat diterapkan atau dihentikan sementara.

“Tidak ada ketegasan dari pemerintah soal penerapan K13. Menurut saya, 6.221 sekolah yang saat ini menerapkan K13 ini sebagai uji coba saja dulu. Di luar jumlah sekolah itu, tetap menerapkan Kurikulum 2006. Nanti tahun depan, kembali dievaluasi bagaimana hasil uji coba K13 itu,” kata Anggota Komisi X Reni Marlinawati, di sela-sela rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung Nusantara I, Selasa (27/01/2015).

Menurut Politisi PPP ini, lebih membingungkan lagi ketika Kemendikbud menghentikan sementara pelaksanaan K13, kemudian mengevaluasinya, malah mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang sudah siap menerapkan K13, dipersilahkan untuk menerapkan. Namun sekolah yang belum siap, tetap menerapkan Kurikulum 2006.

“Saat ini yang menjadi masalah, sekolah-sekolah kemudian berpikir, *toh* dalam waktu lama atau dekat, pasti akan menggunakan K13, maka dari itu siap tidak siap, mereka menerapkan K13. Banyak sekolah di daerah yang memaksakan diri untuk melaksanakan K13. Akhirnya, sekolah itu meraba-raba menerapkan K13. Itu yang terjadi di lapangan, penuh dengan kegalauan dan kebingungan,” imbuhi Reni.

Ironisnya lagi, tambah politisi asal Dapil Jawa Barat IV ini, saat ini juga akan diterapkan Ujian Nasional yang bersifat pemetaan. Sehingga, bagaimana dapat dilakukan pemeta-

## Tidak Ada Ketegasan Pemerintah Soal K13

an, jika kurikulum yang diterapkan berbeda-beda.

“Bagaimana dengan Ujian Nasionalnya nanti? UN memang tidak menjadi penentu kelulusan, tapi akan menjadi salah satunya yaitu pemetaan. Sekarang, bagaimana mungkin bisa menjadi pemetaan, kalau misalnya kurikulum yang diterapkan setiap sekolah berbeda,” kata Reni seolah bertanya.

Untuk itu, ia meminta kepada Mendikbud Anies Baswedan untuk segera mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara penerapan K13, untuk dilakukan evaluasi. Pemerintah merencanakan akan melaksanakan K13 secara serentak pada tahun ajaran 2019/2020, namun menurut Reni itu terlalu lama.

“Saya minta kepada Mendikbud, diambil kebijakan untuk penghentian sementara K13, sambil menyiapkan pelatihan guru, guru sampai ke penyiapan logistiknya. Baru kemudian berjalan secara serentak. Jangan sampai seperti ini, malah berlaku 2 sistem kurikulum,” ujar Reni.

Sementara itu, Anggota Komisi X Popong Otje Djundjuna menyayangkan sikap Kemendikbud era Mendikbud M. Nuh sebelumnya yang tidak menggubris usulan Komisi X. Anggota Komisi X Periode 2009-2014 yang lalu, sudah mengingatkan mantan Mendikbud M. Nuh untuk tidak memaksakan pelaksanaan K13.

“Jika saja Kemendikbud mau mendengar Komisi X untuk tidak memaksakan implementasi Kurikulum 2013 pada tahun itu juga, maka kekisruhan kurikulum tidak akan terjadi. Persiapan penerapan Kurikulum 2013 harus matang. Akibatnya seperti ini, jadi ada dua kurikulum,” sesal Popong.

Politisi Golkar ini mengakui, secara substansi K13 lebih bagus dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Namun, penerapan Kurikulum 2013 secara serentak dipaksakan, padahal masih kurang persiapan.

“Implementasi K13 harus menyiapkan bahan ajar, penyiapan guru, sosialisasi ke tenaga kependidikan yang lain, juga jajaran kepala-kepala daerah. Karena dipaksakan, akhirnya menjadi seperti sekarang, nasi sudah jadi bubur dan susah kembali menjadi nasi lagi. Hal ini menjadi pelajaran yang pahit, jangan ada fenomena ganti menteri ganti kurikulum,” tutup Politisi asal Dapil Jawa Barat I ini.

Implementasi K13 ini pun tak lepas dari sorotan Anggota Komisi X yang lain. Dalam rapat yang berlangsung hingga pukul 23.30 WIB itu, setidaknya 40 Anggota Komisi X mencecar Mendikbud Anies Baswedan beserta jajaran terkait permasalahan seputar pendidikan. (sf), foto : andri/parle/hr.

# Pertemuan ASGPUIC Hasilkan Dua Dokumen Penting

Pertemuan para Sekretaris Jenderal (Sekjen) Parlemen Anggota PUIIC menghasilkan dua dokumen penting di Istanbul, Turki. Dua dokumen itu menyangkut kerja sama administratif Parlemen Anggota PUIIC dan draf Tata Tertib yang mengikat para Sekjen Parlemen Anggota PUIIC.

Pertemuan para Sekjen yang tergabung dalam *Association of Secretaries General of the Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation Member States (ASGPUIC)* berlangsung tiga hari di Istanbul, Turki (20-22 Januari 2015). Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti hadir dalam pertemuan penting yang dihadiri 29 Sekjen Parlemen dari 25 Parlemen Anggota PUIIC. Pertemuan ASGPUIC ini bersamaan pula dengan penyelenggaraan *The 10<sup>th</sup> Session of the PUIIC Conference and Related Meetings* (17-22 Januari 2015).

Pertemuan ini sebetulnya yang pertama bagi ASGPUIC sekaligus ingin mendapat persetujuan dari PUIIC sendiri agar program-program ASGPUIC bisa sejalan dengan agenda PUIIC. Secara resmi dua dokumen penting yang dihasilkan ASGPUIC adalah pertama, *Istanbul Declaration on the First Meeting of Secretaries General of the Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation Member States*. Kedua, *Draft Rules of Procedure of the ASGPUIC*.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti sangat berperan aktif dalam sidang tersebut. Bahkan, ia terpilih



Suasana Sidang ASGPUIC di Istanbul, Turki

sebagai salah satu anggota *Preparatory Committee on Drafting Rules of Procedures*. Indonesia mengusulkan perbaikan *Istanbul Declaration* dengan menambahkan klausul “*strengthened brotherhood and exchange best practices among our member parliaments*” dan “*to support PUIIC to play an important role in the international sphere*”.

Pembahasan *Draft Rules of Procedure* belum mencapai titik temu terutama dalam hal kontribusi tahunan dan besaran yang harus dibayarkan. Sidang menyepakati untuk melanjutkan pembahasan di sela-sela penyelenggaraan Sidang *The 132<sup>nd</sup> Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU)* pada Maret 2015 di Hanoi, Vietnam.

Peran penting yang diberikan kepada Indonesia tidak lepas dari posisi penting lainnya yang dijabat oleh Sekjen DPR sebagai Anggota *Executive Committee Association of Secretaries General of Parliament (ASGP)*. Organisasi ini merupakan himpunan para Sekjen parlemen seluruh dunia dan berada dalam naungan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, sebuah organisasi parlemen seluruh dunia.

Sejarah pembentukan ASGPUIC sendiri memiliki perjalanan cukup panjang dan tidak lepas dari peran para Anggota *Executive Committee ASGP*. Diawali pertemuan informal para Sekjen Parlemen Anggota PUIIC yang hadir pada Sidang ASGP Oktober 2012 lalu di Quebec, Kanada. Pertemuan kemudian berlanjut di Sidang ASGP berikutnya di Quito, Ekuador (Maret 2013) dan Jenewa (Oktober 2013, Maret 2014, dan Oktober 2014).

Akhirnya, terselenggarakan *The First Meeting of the Secretaries General of the Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation Member States (PUIIC)* Januari 2015 di Istanbul ini. Indonesia merupakan salah satu penggagas pembentukan ASGPUIC dan telah terlibat langsung sejak awal sejarahnya. Peran penting Indonesia semakin meningkat sejak terpilihnya Sekjen DPR sebagai Anggota *Executive Committee ASGP* pada Maret 2014. (mh)

foto: dok/parle/hr

## Ketahanan Nasional Negara Mulai Merapuh

Gejala menguatnya separatis di beberapa tempat, kecenderungan anarki sosial yang semakin tinggi menunjukkan bahwa ketahanan nasional negara ini mulai merapuh. Rapuhnya ketahanan ini terjadi karena menurunnya semangat wawasan kebangsaan dan penghayatan terhadap empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI) yang rendah.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Hasril Hamzah Tandjung, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat

dengan Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji di ruang rapat Komisi I DPR Rabu, (28/1) siang.

Hasril menegaskan, terkait pentingnya pemahaman terhadap empat pilar dan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah terluar, Komisi I DPR periode 2009-2014 berkali-kali mendesak Lemhanas dan Wantanas agar secara massif mensosialisasikan, empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai lini kehidu-





pan dengan metode yang menarik dan menyegarkan.

Terkait dengan anggaran, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Penilaian WTP adalah merupakan predikat atau opini terbaik yang ada pada BPK.

“Jadi secara akuntabilitas Lemhanas dan Wantannas adalah baik. Namun demikian belum berarti bahwa akuntabilitas akan selalu berkolerasi positif dengan *out put* atau *out come* dari kegiatan-kegiatan yang diprogramkan,” kata Hasril.

Menurutnya, persoalan utama yang sulit untuk diawasi adalah apakah program yang telah dicanangkan tersebut benar-benar efektif, berhasil, serta bermanfaat di lapangan atau berhenti hanya pada pelaksanaan saja. Perlu dipertanyakan, apakah program itu bersifat berkesinambungan atau hanya bersifat sporadis tanpa adanya arahan dan tujuan yang jelas dari tahun ke tahun atau periode ke periode.

Ketika program penguatan kebangsaan melalui kegiatan seminar, kata Hasril, secara akuntabilitas program tersebut amatlah mudah untuk dipertanggungjawabkan. Apabila kegiatan seminar telah dilaksanakan dan semua pertanggungjawaban pengeluaran atau penyerapan anggaran dapat dibuktikan, maka kegiatan atau program tersebut akuntabel dan layak mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun ketika pasca program tersebut ada tindak lanjut



Wakil Ketua Komisi I DPR Hasril Hamzah Tandjung

atau apakah peserta melakukan aktivitas yang sesuai dengan tujuan kegiatan, sulit untuk dibuktikan. “*Out put* khususnya *out come* inilah yang selalu ditekankan Komisi I DPR kepada seluruh mitranya agar program kerja dan kegiatan yang telah diselenggarakan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara,” ujar Hasril menambahkan. (Spy), foto : andri/parle/hr.

## Ketua DPR Terima Dubes Jordan



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat memberikan cinderamata kepada Dubes Kerajaan Jordan

Ketua DPR Setya Novanto didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf, di ruang kerjanya Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan,

menerima kunjungan kehormatan Dubes Kerajaan Jordan, Walid Abdel Rahman Jaffal Al-Hadid.

Kunjungan tersebut dimaksudkan dalam meningkatkan hubungan bilate-

ral kedua negara termasuk peningkatan hubungan DPR dengan Parlemen Jordan. Sesuai pertemuan, Nurhayati menjelaskan, Ketua DPR berpesan agar forum pertemuan diharapkan akan lebih mempererat hubungan Jordan dan Indonesia, utamanya dapat meningkatkan investasi, perdagangan dan turisme.

Yang juga diharapkan, karena letak Jordan yang sangat strategis di kawasan Timur Tengah, Indonesia mengharapkan peran negara itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Perjuangan panjang yang selama ini dilakukan untuk Palestina merdeka, diharapkan bisa segera terwujud. “Ini sesuai amanat konstitusi kita bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapus, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” katanya.

Untuk kongkritnya, kata Nurhayati, maka kerja sama bilateral segera ditingkatkan baik antara DPR dengan Parlemen Jordan maupun hubungan antar pemerintah kedua negara. Selama ini soal kerja sama antar parlemen ditangani BKSAP, diharapkan

adanya bentuk kerja sama melalui Deklarasi Memorandum of Understanding (MOU).

Menyangkut perlindungan TKI di

Jordan, Ketua BKSAP mengakui memang sekarang ini sedang moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Diharapkan segera ada perbaikan kerja sama,

sebab soal perlindungan TKI sangat penting sebelum pengiriman kembali TKI ke negara di kawasan Timur Tengah itu. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Pemerintah Diharap Kaji Ulang Besaran Biaya Penerbangan Haji

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah dapat mengkaji kembali besaran komponen biaya penerbangan haji. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dalam rapat kerja gabungan dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan, Selasa (27/1).

“Selama ini Komponen terbesar BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) adalah untuk pembiayaan pesawat atau penerbangan haji yang termasuk Direct cost. Saya berharap agar bapak Menhub dapat memberi masukan terkait perhitungan biaya penerbangan haji secara lebih cermat untuk komponen-komponen yang paling dominan. Hingga akhirnya kita bersama-sama



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah

bisa menurunkan BPIH tahun ini,” papar Ledia.

Ditambahkannya, selain mening-

katkan koordinasi antar kementerian terkait, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji kembali besaran komponen biaya penerbangan haji, Komisi VIII juga berharap agar Kementerian Agama dapat meningkatkan negosiasi atau lobi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan penerbangan haji kepada jemaah haji Indonesia.

Bahkan, Komisi VIII juga berharap agar pemerintah meninjau ulang dan memperbaiki MoU (memorandum of understanding) penerbangan haji untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2016 mendatang. (Ayu), foto : andri/parle/hr.

## Komisi IV dan Pemerintah Sepakat 3 Prolegnas 2015



Anggota Komisi IV DPR Ono Surono

Komisi IV DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk mengusulkan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015. Ketiga itu adalah RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuh-

an, RUU Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Anggota DPR Ono Surono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengungkapkan, Komisi IV membicarakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019, membahas terkait usulan-usulan rencana Rancangan Undang-Undang (RUU) dari kementerian, dan juga ada hak inisiatif dari DPR.

“Sudah disepakati ada 10 RUU yang menjadi prioritas dari Komisi IV, dan prioritas di tahun 2015 ada 3 RUU,” katanya, setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan 3 Sekjen Kementerian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (27/1), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Ono menjelaskan, terkait dengan inisiatif DPR, Komisi IV akan dorong RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya. Ini dikaitkan, misalnya sudah ada UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menurutnya, Petani dan Nelayan merupakan mayoritas profesi di Indonesia. Yang juga berdasarkan data banyak kemiskinan yang masih menjerat di 2 kalangan masyarakat ini, padahal sektor sumber daya alam Indonesia sudah jelas

dari sektor pertanian dan kelautan.

“Kita (Komisi IV) dorong di tahun 2015 ini RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya dibuat, untuk bagaimana ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka (nelayan dan pembudidaya) terhadap problem-problem mendasar dari masalah akses pasar, akses modal, dan perlindungan hukum, yang selama ini belum diatur secara jelas,” ungkapnya.

Dari 10 RUU dalam Prolegnas 2015-2019 terdiri dari, usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, RUU tentang perubahan ke-2 atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, RUU tentang Penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan.

Usulan Kementerian Pertanian yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu

RUU tentang Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya, RUU tentang Perikanan, RUU tentang perubahan ke-3 atas UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan RUU tentang Landas Kontinen Indonesia.

Usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang perubahan ke-2 atas UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Jadi ada 10 Prioritas legislasi di Komisi IV, dan di tahun 2015 ini Komisi ini mendorong 3 UU,” tegasnya.

RUU ini harus dikaji dan dibuat secara komprehensif dengan memperimbangan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan Komisi IV akan meminta saran dan pendapat, yang sebelumnya juga akan ada naskah akademiknya.

“Saya pikir UU itu yang pada akhirnya merupakan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan serta penerapannya pun dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap Ono Surono, FPDIP asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap). (as/

*foto:rizka/parle/iw.*

## Presiden Perlu Tanggapi Serius Munculnya Gejolak di Masyarakat



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya

Anggota DPR Tantowi Yahya menegaskan, setelah menyaksikan pemandangan yang “buram” selama 100 hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo, perlu segera ada perbaikan, karena rakyat sudah mulai bergejolak. Kalau melihat sosial media, yang melakukan protes keras bukan dari Koalisi Merah Putih (KMP), tetapi dari Jokowi-bahkan dari partai pendukungnya. “Saya rasa ini harus ditanggapi dengan serius oleh Presiden,” katanya kepada pers Selasa (27/1) siang menanggapi

jalannya pemerintahan Jokowi-JK selama 100 hari.

Politisi muda Golkar ini menyatakan, Pemerintahan sebelumnya dibawah Presiden SBY, kita memberi stempel peragu. Tapi kok ini lebih ragu lagi. “Pak SBY ragu tapi benar, artinya konstitusional, sementara Jokowi ragu-ragu terkadang tidak konstitusional, menabrak UU,” tandas Tantowi.

Dikatakan lebih lanjut, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah menyusul

terjadi krusial seperti sekarang dalam kisruh polri-KPK, terlebih lagi polisi otoritas tertingginya Presiden. “Saya tidak melihat sesuatu yang sulit, kecuali Presiden menanggung beban yang berat, sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan berani untuk melakukan langkah tegas,” katanya.

Kata Tantowi, sebaiknya Jokowi melakukan langkah-langkah jelas dalam waktu segera. Statemennya jangan lagi abu-abu, jangan lagi seperti statemen politisi, statemen Kepala negara, Kepala Pemerintahan seorang Presiden yang mempunyai kekuasaan untuk itu.

“Kita melihat ibarat lukisan yang terpampang dengan jelas. Pertama, Jokowi tidak tegas dalam pemerintahan, padahal mandat rakyat secara mayoritas sudah diberikan kepadanya. Tidak boleh ragu-ragu karena harapan rakyat yang telah memilih presiden, sehingga harus berani tegas dan tidak terpengaruh tangan-tangan lain yang akan mengganggu kekuasaan Presiden,” ujar Pimpinan Komisi I DPR itu dengan menambahkan, harapan rakyat itu tinggi terkait dengan perubahan. Presiden Jokowi diyakini bisa melakukan itu, tetapi yang terlihat Presiden tidak tegas. (mp), foto: andri/parle/hr.

## Komisi VIII Rekomendasikan Sejumlah Hal Dalam Penyelenggaraan Haji 2015

Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja gabungan dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan, Selasa (27/1) merekomendasikan sejumlah hal kepada Menteri Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji 2015.

Diantaranya rekomendasi terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan perumahan, catering dan transportasi untuk pelayanan haji di Arab Saudi. Hal tersebut semata bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji, mengingat selama ini masih ditemui sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Kami juga merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk tidak menyertakan perusahaan catering dan pemondokan haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan DPR pada tahun 2014 lalu dalam proses seleksi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2015,” ujar Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay saat memimpin rapat.

Selain permasalahan catering, Komisi VIII DPR juga merekomendasikan agar Kementerian Agama mempertimbangkan penghentian kebijakan dana talangan haji karena menyebabkan jumlah calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu semakin banyak.

Tidak hanya itu, Komisi VIII berharap Kementerian Agama dapat melakukan kajian terkait kemungkinan untuk memperlakukan kebijakan pembatasan pendaftaran haji dengan



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syariat Islam. (Ayu), foto andri/parle/hr.

## Rieke Rindu Gaya Blusukan Jokowi



Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka

Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai dalam 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo belum

banyak hal yang bisa dilakukannya. Hal tersebut diungkapkannya usai sidang Paripurna DPR RI, Selasa (27/1) di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta.

“Masih banyak hal yang belum dicapai pemerintahan Jokowi dalam 100 hari pemerintahan. Banyak hal yang harus dibenahi. Saya berharap kedepannya Presiden Jokowi bisa lebih fokus pada program nawacita, sehingga pro dan kontra persoalan-persoalan yang terjadi tidak perlu ada dan jangan terulang lagi,” ungkap Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Rieke menambahkan secara pribadi pihaknya merindukan gaya blusukan ala gubernur Jokowi sebelumnya, dimana setelah mengumpulkan pejabat dinas di DKI, membahas program dan mengarahkan para kepala dinas tersebut Jokowi langsung blusukan ke lapangan untuk mengecek kebijakannya itu. Namun saat menjadi Presiden, hal itu belum dilakukan Jokowi.

“Saya yakin pak Jokowi ke depannya bisa dan harus melakukan hal tersebut. Tidak hanya blusukan semata, namun juga ada konsep pembangunan yang dilakukan pemerintahannya. Membedah antara nawacita RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) dengan program-program, serta anggaran politik yang diajukan menteri-menterinya, nyambung atau gak,” pungkasnya. (Ayu), foto : ry/parle/hr.



Anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf

Anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyampaikan keprihatinan karena polemik pemilihan Kapolri baru telah membuat bangsa ini menjadi sorotan dunia internasional. Dalam konteks membangun wibawa bangsa, peran PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dipertanyakan karena jelas kondisi ini tidak produktif.

“Dalam konteks ketatanegaraan apa sudah *balance* peran PPATK. Dalam konteks membangun wibawa negara seharusnya PPATK melengkapi informasi (terkait data Calon Kapolri).

## Polemik Kapolri Coreng Wibawa Bangsa

Sekarang kondisinya kita tercoreng di dunia internasional. Kita tidak ingin orang lain menepoki karena kasus ini, mereka senang kita begini,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/15).

Lebih jauh ia meminta Ketua PPATK menjelaskan kenapa isu rekening gendut masih bergulir karena sepengetahuannya kasus ini sudah dianggap selesai pada saat PPATK dipimpin Yunus Husen. Ia juga menyebut berdasarkan UU, ada fungsi koordinasi yang harus dilakukan lembaga ini yang seharusnya sudah berjalan sebelum nama Kapolri diusulkan.

Pada bagian lain Anggota Komisi III Didik Mukrianto dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan kinerja PPATK dalam mengendus transaksi ilegal yang dilakukan bandar judi dan narkoba. “Saya kok melihat PPATK ini laporannya lebih banyak menyinggung kasus korupsi. Bagaimana dengan transaksi judi dan narkoba. Kita tahu bangsa ini sedang menghadapi darurat narkoba, apa yang sudah dilakukan PPATK menelisik transaksi mereka?”

tanya dia.

Menjawab hal ini Ketua PPATK M. Yusuf mengatakan telah memblokir 160 rekening yang diduga kuat merupakan transaksi judi dan narkoba. Berdasarkan UU no.8/2010 ada empat produk analisis yang dihasilkan lembaganya. Dua diberikan kepada aparat penegak hukum, lainnya sebagai informasi yang disampaikan berkala kepada pihak-pihak termasuk Presiden.

“Kami menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU. Terkait Calon Kapolri pada saat *fit and proper test* Pak Timur, Pak Tarman kami diundang Komisi III tetapi pada saat Pak Budi Gunawan kami tidak diundang,” papar dia.

Kepada wartawan usai rapat Ketua Komisi III Aziz Syamsudin menjelaskan tidak diundangnya PPATK menjelang *fit and proper test* Komjen Po. Budi Gunawan karena kondisi parlemen yang terbelah antara KIH dan KMP. Pada saat itu menurutnya juga ada surat edaran Setneg yang meminta belum perlu rapat di DPR. (iky), foto : andri/parle/hr

## DPR Minta Pemerintah Susun Perppu Terkait Ekspor Konsentrat

Anggota Komisi VII DPR Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra meminta Pemerintah menyusun Perppu khusus untuk memperjelas aturan ekspor konsentrat. “Ini harus diperjelas agar ada kejelasan bagi pelaku usaha seperti Freeport dan perusahaan lainnya,” ujarnya saat RDPU dengan Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsuddin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Selasa, (27/1).

Menurut Supratman, sebaiknya ekspor konsentrat yang dilakukan oleh Freeport itu ditunda dahulu hingga ada aturan yang jelas terhadap ekspor konsentrat itu. “Karena ini sesuai dengan UU Minerba yang melarang eksport konsentrat, jadi tunggu sam-



Suasana RDPU dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi

pai ada kejelasan aturan yang ada,” paparnya.

Terkait *share* saham Freeport, lanjut Supratman, dirinya mengharapkan PT Freeport secara nyata memberikan *share* terhadap Pemerintah daerah Papua agar masyarakat merasa menjadi pemilik yang sah. “Jadi jangan dibagikan dalam bentuk CSR saja, yang merupakan program Freeport,” jelasnya.

Anggota DPR Ramson Siagian (Fraksi Gerindra) mendesak Pemerintah segera mengeluarkan Perppu dengan memasukan pasal tertentu agar permen yang bertolak

belakang yang memperbolehkan *raw material* menjadi runtuh. “Semua *stakeholder* terkait harus membaca semua UU jangan sampai mengeluarkan kebijakan itu melanggar UU, kita harus berada dalam jalur UU,” tegasnya.

Menurutnya, Permen EDM no. 1 tahun 2014 juga harus dicabut, karena yang boleh diekspor itu hanya yang sudah dimurnikan saja. “Sementara terkait pembangunan *smelter* juga harus melakukan revisi UU Minerba dulu karena melanggar UU bila tenggat waktu sudah lewat,” jelasnya. (Sugeng), foto : andri/parle/hr.

## Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik

Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan alasan PT Freeport membangun *smelter*nya di luar Papua.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDPU dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Selasa, (27/1).

“Menyangkut *smelter*, itu merupakan amanah UU Minerba secara teori ekonomi perusahaan yang menguntungkan itu yang terintegrasi secara ekonomi, demikian juga tambang punya lapangan penambangan, *processing* bahan baku atau konsentrat sampai *end product*nya. Itu kalau sampai di hilir semestinya berada dibawah bendera Freeport,” ujar anggota DPR Kurtubi dari Partai Nasdem.

Menurutnya, melalui pembangunan *smelter* tentu produknya akan lebih



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

mahal dibandingkan hanya ekspor konsentrat. “Saya heran kenapa Freeport itu mengeluh soal listrik, lokasi, dan lain-lain. Kalau Freeport bangun *smelter* di NKRI yang untung tentu

perusahaan sendiri, mungkin saja keberatan Perusahaan tambang membangun *smelter* karena mereka punya *smelter* sendiri,” terangnya.

Kurtubi juga mempertanyakan hasil final dari konsentrat tersebut. “Apa sih sebenarnya hasil final *smelter* itu jangan-jangan hasilnya itu uranium. Selain itu kenapa *Smelter* di bangun di Gresik padahal semua fasilitas bisa dibangun di Papua,” tegasnya.

Sementara Anggota DPR Eni Maulani dari Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan dari Freeport terkait pembangunan *smelter* di Gresik yang dinilainya tidak masuk akal. “Ini kenapa tidak dibangun di Papua, tolong jelaskan kenapa di Gresik, selain itu terkait MOU itu apakah kepanjangan soal Pembangunan Freeport apa kontrak,” tanyanya. (Sugeng), foto : andri/parle/hr.

## Komisi I Bentuk Panja Pencurian Pulsa

Panitia Kerja (Panja) Pencurian Pulsa dibentuk karena munculnya permasalahan pencurian pulsa yang dikeluarkan oleh masyarakat secara luas pada pertengahan tahun 2011. Pulsa masyarakat sebagai pengguna jasa layanan telekomunikasi berkurang dengan modus yang beragam antara lain, menerima pesan pendek (SMS) berisi tawaran konten, kuis, undian, atau bonus.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Gedung DPR Senayan Selasa (27/1) sore.

Tantowi menambahkan, selain itu, masyarakat kesulitan melakukan deaktivasi atau unreg setelah menerima pesan SMS premium yang tidak didahului dengan adanya registrasi dari pengguna .



Pimpinan Komisi I DPR RI

Panja ini mengeluarkan enam rekomendasi penting, antara lain Komisi I DPR meminta kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk menjalankan tugas dan kewenangan melalui fungsi pengaturan, pengawasan dan

pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa pesan premium dan pengiriman jasa pesan singkat *broadcast* secara bertanggungjawab, sehingga ke depan BRTI tidak melakukan kelalaian kembali terkait tugas dan kewenangannya.

Komisi I DPR juga mendesak kepada Operator dan *Content Provider* dalam melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Jasa SMS Premium dan SMS *Broadcast* untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada masyarakat sebagai pengguna layanan jasa pesan premium.

Kepada aparat penegak hukum, Komisi I meminta untuk menangani kasus pencurian pulsa secara tuntas sehingga pelaku pencurian pulsa baik operator maupun CP diproses sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang yang berlaku.

Selain itu mendesak BRTI untuk menekankan kepada operator dan *content provider* agar mekanisme pengembalian pulsa kepada korban pencurian merujuk pada data yang dimiliki oleh operator dan mekanismenya/proses pengembalian pulsa kepada masyarakat dilakukan dengan cara yang mudah.

Dalam kaitan ini, Komisi I DPR akan mengawasi pelaksanaan rekomendasi dari Panja Pencurian Pulsa sehingga tujuan dari pembentukan yakni penataan ulang regulasi tata kelola Telekomunikasi seluler serta melakukan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti temuan-temuan pencurian berikut barang bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya dapat terlaksana. (spy), foto : andri/parle/hr.

## Pasar Tidak Berpihak Pada Pemerintah

Harga komoditas kebutuhan bahan pokok belum turun di pasaran, walau harga BBM sudah turun. Pasar sudah telanjur menaikannya seiring kenaikan BBM. Harga kebutuhan pokok tidak mudah turun secara cepat mengikuti harga BBM yang dipatok pemerintah. Ini indikasi pasar tidak berpihak kepada pemerintah.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (Dapil Sumsel I), menilai, ada anomali dalam perekonomian nasional saat ini. Di beberapa negara di dunia harga BBM-nya turun, Indonesia malah naik, bahkan hampir tertinggi di dunia. Saat yang sama harga kebutuhan pokoknya stabil, tidak ikut turun. Ditemui sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/1), Hafisz mengkritik kebijakan BBM dari pemerintah yang ternyata tak mampu menurunkan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran.

“Ini menandakan terjadi salah manajemen dalam tata kelola perekonomian kita. Pasar tidak berpihak lagi kepada rezim Jokowi. Ini bisa diartikan apa yang dilakukan pemerintah nanti akan selalu bereaksi negatif ke pasar. Saya cenderung melihat ini reaksi pasar yang negatif terhadap Pemerintahan Jokowi,” kata Hafisz.

Pemerintah, lanjut politisi PAN itu, harus punya mekanisme untuk menurunkan harga. Pemerintah juga harus menunjuk lembaga yang mampu melakukan operasi pasar untuk menekan harga, baik harga pangan maupun sandang. Penurunan harga ini mesti dilakukan dalam jangka pendek.

Ditanya soal peran KPPU dalam menurunkan harga, Hafisz melihat UU Persaingan usaha juga belum berpihak ke KPPU. Lembaga pengawas persaingan usaha ini, belum bisa bekerja optimal dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia, termasuk upaya menurunkan harga. Untuk itu, Komisi VI DPR sudah mengusulkan untuk mengamandemen UU Persaingan Usaha ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Selain itu, masih ada dua UU lagi yang sedang diajukan ke Baleg, yaitu UU Koperasi dan UU BUMN.

Sekali soal penurunan harga kebutuhan pokok ini, sudah semestinya pemerintah mengaturnya lewat keputusan menteri. “Harus digunakan mekanisme itu. Kan, importir dan pedagang ini tunduk pada aturan regulasi, kecuali kita tidak punya pemerintahan lagi. Ini persoalan yang harus



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

diselesaikan dalam jangka pendek oleh pemerintah,” tambah Hafisz.

Sementara mengomentari operasi pasar yang sedang dilakukan oleh Pemprov di beberapa daerah, menurut Hafisz, sebaiknya ada badan sendiri di daerah yang mampu melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga. “Saya kira sudah tepat operasi pasar ditangani pemerintah daerah. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa untuk menekan kepatuhan tersebut kita harus punya pemimpin yang berwibawa. Kalau pemimpinnya berwibawa ke bawahnya juga akan patuh. Ini harus dijaga.” (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

# Komisi IV Dukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2015-2019

Komisi IV DPR RI mendukung arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2015-2019 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan khususnya bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Disamping itu juga keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, serta mengembangkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta kearifan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dukungan itu terangkum dalam Keputusan Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dengan agenda membicarakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015. Senin (27/1), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Komisi IV DPR RI menerima usulan pagu RAPBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebesar Rp10,594 triliun, dengan perincian sebagai Pagu APBN Tahun 2015 sebesar Rp6,726 triliun, alokasi tambahan RAPBN-P Tahun 2015 berdasarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1,849 triliun, dan pengalihan alokasi tambahan RAPBN-P Tahun 2015 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan sebesar Rp2,018 triliun.

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, saat memimpin Rapat Kerja ini mengungkapkan, Komisi IV juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah diminta memberikan kepastian usaha kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan yang merupakan kewajiban Pemerintah.

Pemerintah juga diminta meninjau



Suasana Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

ulang Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dengan tetap memberikan bahan bakar minyak bersubsidi kepada nelayan tanpa membatasi ukuran atau tonase kapal, serta memberikan subsidi pakan, benih, dan obat-obatan bagi pembudidaya ikan.

Komisi IV juga meminta peninjauan ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 dan 57 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 antara lain dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan.

Patut diketahui, Permen Nomor 56 Tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia, Permen Nomor 57 Tahun 2014 tentang Larangan *Transshipment*, Permen Nomor 1 Tahun 2015 penangkapan lobster, kepiting dan

rajungan, dan Permen nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta dan tidak melanjutkan rencana reklamasi Teluk Bena, serta mengkaji ulang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Komisi ini juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kepentingan rakyat dan pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan demi menjaga keharmonisan dalam dunia usaha dan dapat bermanfaat bagi kemajuan daerah, masyarakat nelayan dan wilayah pesisir. (as) foto:rizka/parle/iw

## Sikap Presiden Tidak Berpihak Pada Penegakan Hukum

Anggota DPR Muhammad Syafi'i mengharapkan, Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas. Kalau yakin apa yang diungkapkan KPK, harus menghentikan pencalonan BG dan mengganti Kapolri yang baru. Tapi kalau meyakini

bahwa yang dibilang KPK mengada-ada, maka segera lantik saja. "Ini tidak dilantik, juga tidak diganti. Itulah sikap asli Jokowi, plin-plan," tegas politisi Partai Gerindra dari Dapil Sumut ini sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa



(27/1).

Hal itu dikatakannya menanggapi perkembangan kasus pencalonan Kapolri BG yang kini bekembang menjadi persekutuan antara KPK dan Polri. Ketika ditanyakan, BW dengan jiwa besar telah mengundurkan diri dari KPK, bagaimana dengan BG, maukah mundur, anggota DPR ini mengatakan, sebenarnya kalau mau, Presiden bisa melakukan itu. "Sikap Jokowi seperti ini jelas tidak berpihak pada penegakan hukum," ujarnya.

Anggota Dewan yang akrab dipanggil Romo ini menyorankan Polri dan KPK sebaiknya menyadari bahwa masing-masing sebagai penegak hukum yang keduanya mempunyai legitimasi untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia. Pada awalnya KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka. Sebenarnya penetapan ini tidak bisa dibalang *ujug-ujug* sebab pada tahun 2010 lalu KPK sudah mengumumkan dia memiliki rekening gendut.

Bahkan saat Presiden mengajukan BG sebagai kandidat menteri, KPK sudah memberikan rapor merah. Karena itu ketika Jokowi kembali mengajukan BG, maka banyak orang mempertanyakan. KPK harus tetap konsisten dengan rapor merah itu, kemudian menetapkan sebagai tersangka.

Sampai pada masalah itu, sebenarnya Presiden harus mengambil sikap tegas, misalnya tidak jadi melantik. Meski sejak awal sudah di rapor merah oleh KPK, tetap harus dilantik, malah selanjutnya mempolitisasi dengan menangkan Wakil Ketua KPK BW. "Ini kan semacam arogansi, menunjukkan lebih banyak mempunyai kekuatan. Tapi pada saat BG mau dipanggil semua saksi dari polisi, panggilan tersebut tidak dipenuhi

la kembali menegaskan, karena masalahnya sudah berkembang demikian ini, maka Jokowi harus melakukan



Anggota DPR Muhammad Syafi'i

tindakan yang tegas. Misalnya, menindaklanjuti kasus BG secara hukum, kemudian setop pencalonan BG atau karena yakin BG tidak bersalah, ya lantik saja.

Meski demikian, soal BW juga harus jelas, sebelum ada pemeriksaan dia tetap bisa menjalankan tugas di KPK. Setelah proses penyidikannya selesai, baru tahap penangkapan. "Intinya sesuaikan tindakan menurut porsi masing-masing, jangan malah unjuk kekuatan," kata Romo mengingatkan. (mp) foto:rizka/parle

## Pengesahan Kode Etik dan Tata Beracara MKD Ditunda



Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjungan

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon yang beragendakan Pengesahan Peraturan DPR mengenai Kode Etik dan Tata Ber-

acara Mahkamah Kohormatan Dewan (MKD), Selasa (27/1) akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan karena setelah Ketua MKD Surahman Hidayat mel-

porkan jalannya pembahasan Kode Etik dan Tata Beracara MKD, sejumlah anggota meminta beberapa materi dalam Kode Etik tersebut perlu dikaji lagi.

Interupsi yang disampaikan Popong Djundjungan antara lain menyoroti Rancangan Kode Etik Pasal 12 ayat (2), anggota dilarang terlibat dalam iklan, sinetron dan/atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial, khususnya yang merendahkan wibawa dan martabat sebagai anggota. Ayat ini perlu penjelasan lebih lanjut, berarti yang tidak merendahkan wibawa dan martabat anggota, boleh dilakukan.

Sedangkan anggota Fraksi PAN Totok Daryanto menyoroti pasal 17 ayat (5) dimana anggota dilarang mengutus tenaga ahli, staf administrasi atau pegawai Setjen DPR menghadiri atau mewakili rapat dan pertemuan yang menjadi fungsi, tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini dinilai me-

langgar hak-hak anggota sebab tidak mungkin setiap anggota menghadiri rapat-rapat komisi atau AKD yang menjadi tanggungjawabnya.

“Intinya masih banyak keberatan dan sejumlah anggota Dewan, terma-

suk perlu disinkronkan dengan UU MD 3, sehingga tidak harus disahkan sekarang ini. Masih perlu didalami oleh fraksi-fraksi,” kata anggota F PDI Perjuangan Rieke Diah Pita Loka.

Karena masih banyak keberatan dari

beberapa anggota DPR, akhirnya Ketua Rapat Fadli Zon menawarkan kepada peserta Rapat Paripurna “Setuju Kode Etik dan Tata Beracara MKD untuk disempurnakan lagi”. (mp) foto:rizka/parle/iv

## Ketua DPR Lantik Lima Anggota PAW

Sebelum memulai sidang paripurna DPR RI dengan agenda pembahasan Kode etik Dewan, Ketua DPR RI, Setya Novanto melantik lima orang anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), Selasa (27/1). Lima orang anggota DPR tersebut berasal dari tiga fraksi berbeda, yakni Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Nasdem.

Tiga orang anggota DPR RI PAW dari Fraksi PKB yang dilantik yakni Arvin Hakim Thoha (Dapil Jawa Tengah III) yang menggantikan Marwan Jafar yang terpilih sebagai Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi. Yaqut Cholil Qoumas dari Dapil Jawa Tengah X menggantikan Hanif Dhakiri yang dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menaker, serta Arzeti Bilbina Setyawan (Dapil Jawa Timur I) yang menggantikan Imam Nachrowi yang terpilih menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Selain Fraksi PKB, Setya Novanto juga melantik dua orang anggota DPR RI PAW lainnya dari fraksi yang berbeda, yakni Ali Mahir dari Dapil Jawa Tengah II yang menggantikan H.M



Suasana saat pelantikan Anggota PAW

Prasetyo yang beberapa waktu lalu diangkat Presiden menjadi Jaksa Agung.

Sementara Mukhniaty dari Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Riau I dilantik menjadi anggota DPR

RI PAW menggantikan Sutan Sukar-notomo yang meninggal dunia pada Oktober silam karena sakit. (Ayu), foto : andri/parle/hr.

## Komisi IX DPR Pertanyakan Aset BPJS Ketenagakerjaan



Anggota Komisi IX DPR Ketut Sustiawan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai akan beroperasi pada 1 Juli 2015. Hal ini sesuai mandat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Waktu yang tidak terlalu lama lagi ini, diperlukan persiapan yang baik sebelum operasional BPJS Ketenagakerjaan mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan pengawasan.

Komisi IX DPR, kemarin, Senin (26/1/2015) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dipimpin Wakil Ketua

Komisi IX Ermalena di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi IX Ketut Sustiawan (F-PDI Perjuangan) mempertanyakan persoalan aset dan pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dipertanyakannya agar tidak terjadi *conflict of interest*.

“Kalau kita lihat transformasi BPJS Ketenagakerjaan dari data Tahun 2013, total aset PT Jamsostek sekitar Rp 153 triliun dan investasinya mencapai Rp 150 triliun, dari hasil perolehan investasi kira-kira sekitar Rp 15 triliun,” papar Ketut.

Anggota Komisi IX Verna Gladies



Merry Inkiriwang mempertanyakan metode atau pendekatan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, Daniel Lumban Tobing (F-PDI Perjuangan) curiga dengan penjelasan yang disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya dalam rapat tersebut. Menurut Daniel, penjelasan Dirut BPJS Ketenagakerjaan terlalu baik.

Daniel menanyakan, apakah ada perbedaan antara struktur organisasi

PT Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada perbedaan, dimana bedanya.

Imam Suroso (F-PDI Perjuangan) mengkritisi keuntungan dana non-Jaminan Hari Tua (seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) yang hanya diserahkan Rp 500 milyar ke BPJS Kesehatan. Padahal, dalam laporan keuangan PT. Jamsostek per 31 Desember 2013, tercatat Rp 2,5 triliun lebih penerimaan bersih non-JHT. “Kemana seharusnya dana tersebut disalurkan?,” tanyanya.

Lanjut Imam, dana JHT yang belum diketahui pesertanya, dan dana tersebut masih ada di pembukuan BPJS Ketenagakerjaan. Awalnya ada 1,8 triliun, tapi terus menurun. “Apa faktor penyebab turun?,” tanyanya.

Imam juga mempertanyakan, investasi dana Jamsostek di PT. Garuda, dimana dana investasi tersebut cenderung merugi tiap tahunnya. Bagaimana ini bisa terjadi. Kemudian, bagaimana nasib pinjaman dana Jamsostek ke PLN sebesar 400 milyar. (sc), foto: naefurodji/parle/hr

## BPJS Ketenagakerjaan Diminta Jabarkan Gaji Direksi

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka meminta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menjabarkan gaji Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Penjabaran gaji diperlukan agar pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan lebih transparan.

Hal tersebut disampaikan Rieke saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Ermalena di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015)

“Saya minta diberikan penjabaran jelas berapa gaji dari Direktur Utama hingga jajaran lain di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ada transparansi di sini,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam rapat yang membahas



Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka

grand design kebijakan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Rieke juga meminta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk menjelaskan biaya iklan yang digunakan perusahaan untuk mempublikasikan program

yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan di televisi.

“Saya beberapa kali lihat wajah bapak di televisi swasta, yang saya ingin tanyakan berapa biaya iklan yang digunakan BPJS? Karena menggunakan slot televisi itu biayanya tidak sedikit, mohon data dan penjelasannya pak,” tegasnya.

Selanjutnya Rieke menanyakan bagaimana audiens setelah melihat tayangan program tersebut. “Apakah mereka paham dengan adanya tayangan ini?” tanya Rieke.

Selain itu, Rieke juga meminta klarifikasi dana pinjaman PT. Jamsostek (sebelum berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan) ke PT. PLN (Persero). (sc), foto: naefurodji/parle/hr.

## BW Mundur dari KPK, Komisi III Hormati

Komisi III DPR RI menghormati pilihan Bambang Widjojanto (BW) yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memilih mundur karena status tersangka pada saat masih menjabat, bisa dipastikan bukan pilihan yang mudah.

“Ini sangat tergantung individu masing-masing. Kalau Mas BW memang betul berhenti sementara untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, saya hormati Mas BW,” kata anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Ketika ditanya wartawan tentang

masih bertahannya Komjen Pol. Budi Gunawan - Kapolri terpilih - padahal juga menyandang status tersangka, menurutnya itu pilihan individu. “Itu sangat tergantung personal masing-masing,” tutur dia.

Bicara pada kesempatan berbeda Ketua Komisi III Aziz Syamsudin terlihat terkejut mendengar informasi pengajuan mundur BW. “Ah belum (mundur) ah,” katanya ketika diminta wartawan menyampaikan komentar tentang hal itu.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini kemudian menambahkan berdasarkan UU no.30/2002 tentang KPK, keputusan akhir apakah menerima atau menolak



Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifah

pengunduran ini ada di tangan presiden. “Tinggal menunggu SK Presiden. Nah perlu tidaknya SK itu dikeluarkan hanya presiden yang bisa menjawab,” pungkask dia. (iky), foto: andri/parle/hr.

# PIA DPR Gelar Pengobatan Gratis

Hujan yang terjadi selama beberapa hari sebelumnya sempat membanjiri beberapa kawasan ibukota termasuk pemukiman nelayan, Kalibaru, Cilincing Jakarta utara. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan dari para istri anggota DPR RI yang tergabung dalam PIA (Persaudaraan Istri Anggota) DPR (PIA). Sebagai wujud solidaritas antar sesama, PIA menggelar Bhakti sosial di pemukiman tersebut.

“Bhakti sosial berupa pengobatan gratis ini menjadi salah satu program kami (PIA) sebagai wujud solidaritas antar sesama, juga sebagai bentuk terimakasih kami kepada masyarakat yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada bapak-bapak atau suami-suami kami menjadi wakil rakyat atau anggota DPR,” jelas Deisti A Novanto, Ketua PIA Periode 2014-2019.

Deisti menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program yang rencananya akan digelar dua bulan sekali ini mengambil lokasi yang berbeda-beda. Dimana setiap lokasinya dipimpin oleh panitia inti dari latar belakang partai yang berbeda-beda. Meski demikian, seluruh anggota PIA tetap ikut berperan serta dalam pelaksanaan bhakti sosial ini.

“Meski setiap bhakti sosial ditetapkan panitia inti dari partai yang berbeda-beda, namun setiap pelaksanaannya kami tidak mengatasnamakan partai, melainkan PIA. Begitupun pada bulan Februari nanti, Insha Allah kami akan menggelar seminar untuk anggota PIA, staf serta karyawan DPR RI yang tujuan utamanya sebagai tambahan pengetahuan dan pengem-



Suasana Bhakti Sosial diselenggarakan PIA DPR

bangun diri,” paparnya.

Sementara itu Ketua Panitia Bhakti Sosial Pengobatan Gratis di Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara, Lia Bambang Haryo bersyukur bahwa pelaksanaan bhakti sosial kali ini lancar dan tepat sasaran. Bagaimana tidak, dari masyarakat yang mendatangi pengobatan gratis ini jumlahnya melebihi target yang sengaja disiapkan panitia.

“Kami menyiapkan 500 kupon pengobatan gratis dimana 300 sudah terdata sebelumnya dan 200 kupon yang sengaja disiapkan untuk masyarakat yang belum terdata alias langsung datang. Namun ternyata jumlah yang datang lebih dari 600 orang, artinya melebihi target yang ditetapkan, Alhamdulillah lancar dan tepat sasaran,” papar Lia.

Lia menambahkan, dari laporan Tim medis yang ikut bekerjasama dalam program bhakti sosial ini diketahui keluhan yang paling banyak dialami masyarakat sekitar adalah berupa penyakit kulit seperti gatal-gatal dan penyakit ISPA (inspeksi saluran pernafasan atas). Hal ini mengingat daerah tersebut termasuk kawasan pesisir yang berdekatan dengan laut yang notabene minim air bersih.

Baik Deisti maupun Lia menyadari bahwa pengobatan gratis yang hanya sekali dilakukan di lokasi itu tidak sepenuhnya dapat memberikan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat, oleh karena itu keduanya berharap agar pemerintah juga lebih memperhatikan kesehatan masyarakat pesisir.

(Ayu) foto:ry/parle

## Heri Gunawan: PMN Bukan Bancakan

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) diharapkan berperan aktif menjadi agen pembangunan nasional, terutama di bidang-bidang penting yang bisa jadi jauh dari profit. Untuk menguatkan peran itu dipandang perlu memberikan stimulus termasuk dukungan anggaran lewat program PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN yang terbukti mempunyai kemampuan.

“Kita mempertimbangkan memberi-



Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan

kan tambahan alokasi anggaran dalam APBN-P, diantaranya pemberian PMN kepada BUMN bidang infrastruktur. Tujuannya mendukung BUMN merealisasikan program infrastruktur yang saat ini sedang digenjut. Patut dicatat PMN ini bukan bancakan, bukan untuk bayar hutang perusahaan,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini



menambahkan PMN diberikan kepada BUMN dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan hasil temuan BPK atas kinerja BUMN serta mengacu pada PP no.44 tahun 2005.

Untuk mengefektifkan pemantauan maka komisi yang membidangi masalah ekonomi dan BUMN ini menurutnya perlu membentuk Panitia Kerja - Panja PMN. "Melalui Panja ini

kita melakukan pendalaman sedalam mungkin atas *business plan* BUMN terkait dengan lebih jelas dan tegas," tuturnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini mengusulkan BUMN penerima PMN lebih baik menerapkan pembukuan terpisah sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan. Kebijakan lain mengurangi setoran deviden agar bisa menjaga likuiditas

perusahaan dan memperkuat modal.

"Pengurangan ini dapat dilakukan dan diberlakukan kepada BUMN yang memiliki potensi perkembangan bisnis yang baik dan tinggi di masa depan dan kontribusi deviden harus dialokasikan kepada pos lain yang lebih produktif, guna pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik," demikian Heri.

(iky) foto: iwan armanias/parle/hr

## Ciptakan Parlemen Modern Pimpinan DPR Silaturahmi dengan Media Massa



Pimpinan DPR RI memberikan cinderamata kepada Pemimpin Redaksi Majalah Tempo

Media menjadi alat penting dalam melakukan kontrol sosial dengan saran, masukan bahkan sikap kritis yang sifatnya membangun, termasuk kepada DPR sebagai lembaga tinggi Negara. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI usai mengunjungi Kantor redaksi Majalah dan Koran Tempo, Kamis (29/1) di Kebayoran Lama, Jakarta Barat.

"Dalam rangka menciptakan parlemen modern, kami membuka akses seluas-luasnya kepada publik termasuk media. Oleh karena itu kami sengaja mendatangi media-media termasuk Tempo diantaranya untuk meningkatkan tali silaturahmi serta menjangkau masukan dan kritik-kritik membangun, tentu semua itu demi kemajuan bangsa.

Karena sebagaimana kita ketahui media menjadi alat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat luas," papar Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Pada kesempatan itu, jajaran redaksi Tempo yang dipimpin oleh Pemimpin redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli mempertanyakan berbagai hal diantaranya terkait seratus hari kinerja pemerintahan Jokowi. Termasuk diantaranya penunjukan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri, dan penangkapan Bambang Widjajanto yang berujung pada kisruh dua lembaga Negara Polri dan KPK.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa dalam seratus hari pemerintahan

Jokowi ini ada plus dan minus nya. Fadli mengatakan bahwa sejatinya keinginan dari presiden Jokowi untuk kedaulatan negeri ini cukup besar, namun seperti jajaran menteri yang tidak bisa menerjemahkannya dengan baik.

"Saya menilai Kabinet Jokowi ini seperti kabinet pelaksana, bukan kabinet berpikir. Jadi para menteri hanya menjalankan instruksi dari Presiden saja. Itu tentu menjadi beban berat bagi Presiden Jokowi sendiri," ungkap Fadli.

Sebut saja, adanya beberapa pelanggaran Undang-undang yang dilakukan dalam pemerintahan Jokowi. Misalnya, tentang nomenklatur, pelanggaran terhadap Undang-undang sistem pendidikan Indonesia, juga pelanggaran terhadap Undang-undang Papol dimana Menteri Hukum dan HAM yang mengambil keputusan satu hari setelah pelantikannya tanpa melihat terlebih dahulu UU Papol yang ada.

Meski demikian, Pimpinan DPR sepakat untuk memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi yang tegas dalam pemberantasan Narkoba dengan pengeksekusian hukuman mati bagi terpidana. Karena memang diakuinya narkoba saat ini sudah memakan korban jiwa sebanyak 4,5 juta jiwa. Walaupun diakuinya untuk pengeksekusian hukuman mati bagi WNA akan berdampak bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Namun dengan adanya komunikasi politik yang baik, Pimpinan DPR yakin pengeksekusian hukuman mati pemerintahan Jokowi tidak akan sampai merusak hubungan Indonesia dengan negara sahabat. (Ayu)

foto:denus/parle/iw

# Anggota DPR Kritik Larangan Penangkapan Benih Lobster



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Permen KP No. 1/2015 tentang pelarangan

penangkapan lobster, kepiting dan rajungan bertelur dan bibit. Padahal itu sudah menjadi penghasilan tradisional masyarakat di beberapa wilayah, utamanya yang pernah dikunjungi Komisi IV Nusa Tenggara Barat.

Herman mengatakan kalau punya visi masa depan tentang menjaga laut, menambah nilai tambah dari benih-benih itu harus ada masa transisi yang dapat memberikan rasa aman terhadap pendapatan masyarakat.

“Jadi tidak serta merta kebijakan itu ditegakkan dengan atas nama pembangunan jangka panjang tetapi mengorbankan terhadap situasi dan kondisi masyarakat saat ini,” katanya disela Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Senin (26/1), di Gedung Parlemen. Jakarta.

Menurutnya, hal ini persoalannya sama dengan *transshipment*, dan kebi-

jakan lainnya yang ditentang masyarakat. Bukan berarti kita tidak setuju dengan *sustainable development* atau visi yang akan datang, tetapi persoalannya ada visi yang akan datang mengorbankan situasi masa kini.

“Hakekat pembangunan itu untuk masyarakat, dan potensi sumberdaya alam yang ada untuk rakyat. Kalau rakyat adanya seperti itu lantas hasil sumber daya alam itu akan ditahan sedikit untuk bernilai tambah, semestinya ada masa transisi yang menjadi kewajiban pemerintah mengaturnya. Jangan kemudian atas nama pembangunan jangka panjang tetapi mengorbankan saat ini,” tegas Herman. Walaupun demikian dia setuju, asas pembangunan tidak akan menghabiskan saat ini dengan mengorbankan masa yang akan datang. (as), foto : riska arinindyaparle/hr.

# Komisi III Minta BNPT Pantau ISIS

Komisi III DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan perhatian terhadap dinamika organisasi teroris ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Sejumlah pihak menyebut ideologi ISIS yang kemudian juga dikenal dengan IS (*Islamic State*) mulai mempengaruhi pemuda di banyak negara.

“Kenapa IS ini menyebar begitu cepat, apa karena ideologinya kena dengan yang muda. Ini yang harus jadi perhatian kita terutama BNPT,” kata anggota Komisi III Wenny Warouw saat rapat dengar pendapat dengan BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut tugas BNPT semakin berat karena organisasi teroris sejak tahun 1999 seperti api yang tidak bisa dipadamkan, menyala terus. Mantan perwira tinggi Polri ini juga mempertanyakan kesigapan BNPT dalam menyikapi dinamika keamanan di tanah air. “Beberapa waktu lalu ada *travel*



Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw

ban dari AS dan Australia, seharusnya peringatan itu dari BNPT,” tekannya.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III Abu Bakar Alhabsyi meminta penjelasan sejauh mana geliat ISIS di Indonesia. Ia juga meminta kepastian soal dugaan jumlah anggota atau simpatisan organisasi ini di tanah air serta yang ikut angkat senjata di kawasan Irak dan Syria.

“Ada yang menyebut ISIS ini adalah buatan intelejen, saya tidak maulah menyebut negaranya. Tujuannya agar wilayah Arab ini ribut terus. Kondisi ini yang harus diantisipasi,” papar Politisi dari Fraksi PKS ini.

Menjawab hal ini Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan eksistensi ISIS sudah terasa di Indonesia. Namun ia memastikan jumlah anggota dan simpatisan organisasi ini sejauh ini barulah dugaan, masing-masing menyebut angka berdasarkan referensi masing-masing.

BNPT lanjut dia, saat ini masih melakukan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki Polri dan BIN. Ia berharap upaya deradikalisasi yang saat ini dilakukan BNPT di sejumlah daerah mendapat dukungan dari pemerintah dan DPR. “Kita kerja sama dengan banyak pihak termasuk dengan ulama, melakukan reedukasi, resosialisasi, kontraradikalisasi. Prinsipnya ini tidak boleh berkembang,” kata dia. (iky) foto: andriparle/hr

# Dialog Politik Hangatkan Pertemuan Pimpinan DPR dan RM



Pimpinan DPR RI memberikan cinderamata kepada Pemimpin Umum Harian Rakyat Merdeka

Politik mutakhir Indonesia menjadi bahan perbincangan menarik dan hangat saat Pimpinan DPR RI berkunjung ke kantor redaksi Rakyat Merdeka (RM). Kritik tajam dan apresiasi mewarnai perbincangan soal 100 hari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Perseteruan KPK-Polri juga tak luput jadi topik perbincangan.

Hadir dalam kunjungan tersebut tiga Pimpinan DPR, Setyo Novanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah. Ketiganya diterima Dewan Redaksi RM di Graha Pena, Jakarta, Rabu (28/1) sore. Kiki Iswara (Pemimpin Umum), Ratna Susilowati (Pemimpin Redaksi), dan Budi Rahman Hakim (Pemimpin Perusahaan) menerima kehadiran Pimpinan DPR di ruang redaksi bersama para staf dan jurnalis setempat. Suasana akrab penuh tawa mewarnai pertemuan.

Kondisi aktual politik dalam negeri jadi pembuka perbincangan bersama awak media RM. Menurut Novanto, terlalu dini memang menilai pemerin-

tahan Jokowi dalam 100 hari. Bahwa ada yang perlu dievaluasi sekaligus dikritik, itu hal wajar dalam sebuah penilaian atas jalannya pemerintahan ini. Apresiasi misalnya disampaikan atas penyusunan rancangan APBN-P 2015. Anggaran yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan sarana pertanian perlu diapresiasi.

Sementara itu, Fadli Zon menilai rapor pemerintahan Jokowi banyak merahnya daripada birunya. Ini harus jadi perhatian Presiden dan kabinetnya. Janji-janjinya kepada masyarakat saat kampanye dulu ternyata banyak yang tidak terealisasi. Kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, gas elpiji 12 kg, hingga kenaikan tarif dasar listrik, ternyata telah menyengsarakan rakyat.

Di sisi lain masih ada yang perlu diapresiasi dari Jokowi, yaitu menghukum mati para terpidana kasus narkoba dan mampu menjaga kedaulatan laut Indonesia dengan menenggelamkan

kapal asing pencuri ikan di perairan Nusantara.

“Saya kira ini kunjungan ke media yang selalu menjadi partner parlemen seperti RM. Ini, kan, surat kabar nasional. Ini bagian dari komunikasi dengan kawan-kawan media untuk memberikan *inside* apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dikerjakan DPR, maupun agenda-agenda DPR juga. Selain itu bertukar pikiran juga dan silaturahmi,” komentar Fadli usai pertemuan.

Kritik objektif, proporsional, tidak keluar dari rambu-rambu dan norma-norma, menjadi harapan Fadli kepada media massa. “Selama kritik itu berdasar, tentu tidak ada masalah,” kata Fadli lagi. Sementara Novanto mengatakan, “Saya menilai sangat positif kunjungan kita ke Rakyat Merdeka. Ini memberi suatu saran dan masukan-masukan yang berguna bagi Pimpinan DPR. Kita ingin bekerja terus antara pimpinan DPR dan Rakyat Merdeka.”

(mh) foto:rizka/parle/iw



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Agus Hermanto menerima kunjungan kehormatan Hon. Mr. Lee Sangmin, Chairman of the Legislation and Judiciary Committee of the ROK National Assembly, Selasa (20/01) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr



BURT DPR RI RDP dengan PT Jasindo, PT AdMedika, dan Setjen DPR RI dipimpin Ketua BURT Roem Kono membahas Program Jamkestama dan Rancangan Renstra DPR RI 2015-2019, Kamis (22/01) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr



Suasana sebelum Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kamis (29/01) Foto: Andri/Parle/Hr